

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari program pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Sosial yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah *“Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin”* serta *“Keberpihakan terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difable, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pekerja migran”*, yang diwujudkan melalui 3 (tiga) strategi antara lain : (a) Meningkatkan pemberdayaan rumah tangga fakir miskin (FM) dan orang tidak mampu (OTM) yang terdata dalam DTKS; (b) Meningkatkan pemberdayaan difable; dan (c) Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan, anak, lansia, dan PMKS lainnya, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2022 dipandang sangat penting untuk dijadikan

sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada tahun 2023 nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
8. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Sosial yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021-2026.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya organisasi.
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

RENJA Kabupaten Blitar Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu. dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM. maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji. disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah. serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Berisi uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional/internasional. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. alasan proses tersebut dilakukan. serta temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi. LSM. asosiasi-asosiasi. perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III. TUJUAN. SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari tabel program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2021. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (a) realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (b) realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan (c) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai Peraturan Bupati Blitar No.37 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial/d Tahun 2021 Kabupaten Blitar :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2026 Kabupaten Blitar

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06	Dinas Sosial									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	3 buah dokumen	3 buah dokumen	999.900	999.900	100%	3 buah dokumen	999.900	20%
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	6 buah dokumen	6 buah dokumen	1.086.800	1.086.800	100%	6 buah dokumen	1.086.800	20%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan gaji dan tunjangan asn	100 %	100 %	3.843.832.389	3.843.832.389	100%	100 %	3.843.832.389	20%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah jenis layanan administrasi	6 layanan	6 layanan	40.756.850	40.756.850	100%	6 layanan	40.756.850	20%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum									

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perangkat Daerah									
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	76.522.050	76.522.050	100%	100%	76.522.050	20%
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.152.570	22.152.570	100%	12 Bulan	22.152.570	20%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase pemenuhan cetak dan penggandaan	100 %	100 %	11.431.400	11.431.400	100%	100 %	11.431.400	20%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan minum rapat dan tamu	1000 makan minum	1000 makan minum	639.090.000	639.090.000	100%	1000 makan minum	639.090.000	20%
		jumlah rapat koordinasi yang dihadiri	48 kegiatan	48 kegiatan				48 kegiatan		
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan untuk menunjang Kinerja ASN	50 Unit	50 Unit	237.269.770	237.269.770	100%	50 Unit	237.269.770	20%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	5.250.000	5.250.000	100%	12 Bulan	5.250.000	20%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa									

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah layanan	3 layanan	3 layanan	53.261.756	53.261.756	100%	3 layanan	53.261.756	20%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan umum kantor	100 %	100 %	409.290.000	409.290.000	100%	100 %	409.290.000	20%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas	26 buah kendaraan	26 buah kendaraan	392.960.000	392.960.000	100%	26 buah kendaraan	392.960.000	20%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah aset yang berfungsi baik	50 buah	50 buah	78.100.000	78.100.000	100%	50 buah	78.100.000	20%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dirawat	1 gedung	1 gedung	280.500.000	280.500.000	100%	1 gedung	280.500.000	20%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya	75 penyelenggara	75 penyelenggara	30.000.000	30.000.000	100%	75 penyelenggara	30.000.000	20%
		Penyebarluasan informasi dana sosial melalui massmedia	1 massmedia	1 massmedia				1 massmedia		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pekerja sosial masyarakat kewenangan kab yang difasilitasi	22 orang	22 orang	75.000.000	75.000.000	100%	22 orang	75.000.000	20%
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab yang difasilitasi	22 orang	22 orang	243.799.800	243.799.800	100%	22 orang	243.799.800	20%
		Jumlah penerima KUBE yang difasilitasi	50 orang	50 orang				50 orang		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	27 orang	27 orang	2.649.799.800	2.649.799.800	100%	27 orang	2.649.799.800	20%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat yang difasilitasi								
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	100%	100 %	120.000.000	20%
		jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi	100 orang	100 orang				100 orang		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200 orang	200 orang	853.795.250	853.795.250	100%	200 orang	853.795.250	20%
		jumlah Penyandang Disabilitas	200 orang	200 orang				200 orang		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direunifikasi dengan keluarga								
		jumlah penyandang disabilitas berat yang difasilitasi	150 orang	150 orang				150 orang		
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberi bimbingan	15 orang	15 orang	49.885.000	49.885.000	100%	15 orang	49.885.000	20%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	jumlah paket makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids	100 paket	100 paket	54.994.500	54.994.500	100%	100 paket	54.994.500	20%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan Napza di Luar Panti Sosial yang disediakan								
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberi bimbingan	100 keluarga	100 keluarga	100.238.380	100.238.380	100%	100 keluarga	100.238.380	20%
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberi rujukan	15 orang	15 orang	70.900.000	70.900.000	100%	15 orang	70.900.000	20%
		jumlah fasilitasi program adopsi anak	5 anak	5 anak				5 anak		
		jumlah fasilitasi program tetirah	20 anak	20 anak				20 anak		
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 kerjasama	2 kerjasama	76.120.000	76.120.000	100%	2 kerjasama	76.120.000	20%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN									

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	DAN JAMINAN SOSIAL									
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase update data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	839.290.500	839.290.500	100%	100 %	839.290.500	20%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	300.669.500	300.669.500	100%	100 %	300.669.500	20%
		jumlah penerima BPNT yang difasilitasi	98.000 KPM	98.000 KPM				98.000 KPM		
		jumlah penerima PBI-JK yang difasilitasi	402.000 KPM	402.000 KPM				402.000 KPM		
		jumlah penerima PKH yang difasilitasi	51.000 KPM	51.000 KPM				51.000 KPM		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1000 paket	1000 paket	1.249.999.600	1.249.999.600	100%	1000 paket	1.249.999.600	20%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah korban bencana yang diberi pendampingan psikososial	20 orang	20 orang				20 orang		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana	1 kampung	1 kampung	349.158.500	349.158.500	100%	1 kampung	349.158.500	20%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah Taruna Siaga Bencana	40 orang	40 orang	404.639.775	404.639.775	100%	40 orang	404.639.775	20%
					13.560.794.090	13.560.794.090			13.560.794.090	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian						Ctt
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase PMKS yang ditangani	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-
2	Persentase PMKS yang diberi bantuan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-
3	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Sosial pada tingkat pemerintah provinsi. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya. jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari isu-isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Tingginya jumlah PMKS.
- 2) Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PMKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun.
- 3) Rendahnya keterampilan PMKS. serta rendahnya kesadaran PMKS saat akan diberi pelatihan keterampilan.
- 4) Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.

- 5) Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun yang mengakibatkan hilangnya harta benda yang dimiliki korban bencana.
- 6) Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam di Blitar selatan.
- 7) Kurangnya sarana sosial/ penampungan sementara/ rumah singgah/ tempat rehabilitasi PMKS.
- 8) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS.
- 9) Rendahnya kualitas dan kuantitas PSKS (Rekan Dinas Sosial) dalam penanganan PMKS.
- 10) Adanya mental yang salah, yaitu mental suka diberi bantuan pada diri sebagian besar PMKS.
- 11) Rendahnya akses informasi dan pelayanan pemerintah yang dapat dijangkau oleh PMKS karena keterbatasan teknologi yang dimiliki.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar terdapat 1 (satu) program rutin dan 4 (empat) Program yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi Dinas Sosial, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar maka pada tahun 2022 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2022 dimana didalamnya terdapat 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	jumlah dokumen	3 buah dokumen	1.000.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	jumlah dokumen	6 buah dokumen	1.087.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	persentase pemenuhan gaji dan tunjangan asn	100 %	3.333.876.116	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial	jumlah jenis layanan administrasi	6 layanan	40.756.850	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	235.000.000	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 Bulan	22.152.570	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	persentase pemenuhan cetak dan penggandaan	100 %	5.630.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	jumlah makan minum rapat dan tamu	1000 makan minum	190.000.000	
							Dinas	jumlah rapat koordinasi yang	48 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Sosial	dihadiri			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Tersedianya Peralatan untuk menunjang Kinerja ASN	50 Unit	237.269.770	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Tersedianya materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	5.250.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	jumlah layanan	3 layanan	53.600.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan umum kantor	100 %	409.290.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	jumlah kendaraan dinas	26 buah kendaraan	15.000.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	jumlah aset yang berfungsi baik	50 buah	78.100.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	jumlah gedung kantor yang dirawat	1 gedung	15.000.000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
						Pengumpulan Sumbangan dalam					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Daerah Kabupaten/Kota					
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Blitar	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya	75 penyelenggara	100.000.000	
							Kab. Blitar	Penyebarluasan informasi dana sosial melalui massmedia	1 massmedia		
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
						Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	jumlah pekerja sosial masyarakat kewenangan kab yang difasilitasi	22 orang	350.000.000	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	jumlah potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab yang difasilitasi	22 orang	250.000.000	
							Kab. Blitar	Jumlah penerima KUBE yang difasilitasi	50 orang		
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi	27 orang	450.000.000	
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Blitar	persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	100 %	616.495.000	
							Kab. Blitar	jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi	100 orang		
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
						Penyediaan Permakanan	Kab. Blitar	jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	200 orang	1.510.000.000	
							Kab. Blitar	jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direunifikasi dengan keluarga	200 orang		
							Kab. Blitar	jumlah penyandang disabilitas berat yang difasilitasi	150 orang		
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Blitar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberi bimbingan	15 orang	50.000.000	
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
						Penyediaan Permakanan	Kab. Blitar	jumlah paket makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang disediakan	100 paket	100.000.000	
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Kab. Blitar	jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	100 keluarga	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberi bimbingan			
						Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Blitar	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberi rujukan	15 orang	100.000.000	
							Kab. Blitar	jumlah fasilitasi program adopsi anak	5 anak		
							Kab. Blitar	jumlah fasilitasi program tetirah	20 anak		
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 kerjasama	150.000.000	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	persentase update data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	100 %	1.550.000.000	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	persentase pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	100 %	750.000.000	
							Kab. Blitar	jumlah penerima BPNT yang difasilitasi	98.000 KPM		
							Kab. Blitar	jumlah penerima PBI-JK yang difasilitasi	402.000 KPM		
							Kab. Blitar	jumlah penerima PKH yang difasilitasi	51.000 KPM		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
						Penyediaan Makanan	Kab. Blitar	jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1000 paket	10.500.000.000	
							Kab. Blitar	Jumlah korban bencana yang diberi pendampingan psikososial	20 orang		
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Blitar	jumlah kampung siaga bencana	1 kampung	846.024.000	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Blitar	jumlah Taruna Siaga Bencana	40 orang	544.134.000	
										22.709.665.306	

Sumber: Dinas Sosial 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan pembangunan yang bersifat non fisik. Pada saat penyusunan RENJA 2022 ini maka hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) belum diputuskan sehingga data usulan program dan kegiatan masyarakat tidak bisa ditampilkan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia memiliki visi (2015-2019) adalah “Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kemanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 (Sembilan) agenda prioritas pemerintah (Nawacita) meliputi:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan di Kabupaten Blitar yaitu kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Untuk mewujudkan visi kabupaten Blitar maka misi pembangunan kabupaten Blitar tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 6 (enam) poin utama dimana salah satunya dan menjadi yang teratas adalah : meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan sosial baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2020, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan sosial di Kabupaten Blitar dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu acuan bagi penyusunan renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan agar program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tetap linier dengan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/kegiatan yang disusun oleh Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown

program/kegiatan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam Renstra Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa salah satu isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan Kabupaten Blitar adalah : *“Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin”* serta *“Keberpihakan terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difable, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pekerja migran”*. Berdasarkan prioritas tersebut maka Dinas Sosial telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Sosial di Kabupaten Blitar antara lain :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, pembangunan tahun 2022 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus pada tahun pertama. Pada tahun 2022, Sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu *mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin serta keberpihakan terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difable, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pekerja migran*. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2022 terdapat 5 Program, 14 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan pendukung.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Sosial Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1. Sasaran Dinas Sosial berdasarkan Arah kebijakan tahun 2022 dalam RPJMD adalah menurunnya angka PMKS. Untuk mencapai sasaran tersebut, 5 (lima) program Dinas Sosial tahun 2021 yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Pemberdayaan Sosial; (3) Program Rehabilitasi Sosial; (4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan (5) Program Penanganan Bencana merupakan program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun pertama, pembangunan tahun 2022 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang

belum menjadi fokus pada tahun pertama. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2021 terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan pendukung. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bidang Sosial Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06	Dinas Sosial								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Dinas Sosial	3 buah dokumen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 buah dokumen	1.000.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Dinas Sosial	6 buah dokumen	1.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 buah dokumen	1.087.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan gaji dan tunjangan asn	Dinas Sosial	100 %	3.333.876.116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	3.333.876.116
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah jenis layanan administrasi	Dinas Sosial	6 layanan	40.756.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		6 layanan	40.756.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Umum			
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	100%	235.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	235.000.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Dinas Sosial	12 Bulan	22.152.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	22.152.570
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase pemenuhan cetak dan penggandaan	Dinas Sosial	100 %	5.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	5.630.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan minum rapat dan tamu	Dinas Sosial	1000 makan minum	190.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 makan minum	190.000.000
		jumlah rapat koordinasi yang dihadiri	Dinas Sosial	48 kegiatan				48 kegiatan	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan untuk menunjang Kinerja ASN	Dinas Sosial	50 Unit	237.269.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	237.269.770

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan Benda Pos Lainnya	Dinas Sosial	12 Bulan	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5.250.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah layanan	Dinas Sosial	3 layanan	53.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 layanan	53.600.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan umum kantor	Dinas Sosial	100 %	409.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	409.290.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas	Dinas Sosial	26 buah kendaraan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 buah kendaraan	15.000.000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah aset yang berfungsi baik	Dinas Sosial	50 buah	78.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 buah	78.100.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	jumlah gedung kantor	Dinas	1 gedung	15.000.000	Dana		1 gedung	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang dirawat	Sosial			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaannya	Kab. Blitar	75 penyelenggara	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 penyelenggara	100.000.000
		Penyebarluasan informasi dana sosial melalui massmedia	Kab. Blitar	1 massmedia				1 massmedia	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pekerja sosial masyarakat kewenangan kab yang difasilitasi	Kab. Blitar	22 orang	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 orang	350.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab yang difasilitasi	Kab. Blitar	22 orang	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 orang	250.000.000
		Jumlah penerima KUBE yang difasilitasi	Kab. Blitar	50 orang				50 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi	Kab. Blitar	27 orang	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 orang	450.000.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	Kab. Blitar	100 %	616.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	616.495.000
		jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi	Kab. Blitar	100 orang				100 orang	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kab. Blitar	200 orang	1.510.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 orang	1.510.000.000
		jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Kab. Blitar	200 orang				200 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direunifikasi dengan keluarga							
		jumlah penyandang disabilitas berat yang difasilitasi	Kab. Blitar	150 orang				150 orang	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberi bimbingan	Kab. Blitar	15 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 orang	50.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	jumlah paket makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang disediakan	Kab. Blitar	100 paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 paket	100.000.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di	Kab. Blitar	100 keluarga	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 keluarga	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Luar Panti Sosial yang diberi bimbingan							
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberi rujukan	Kab. Blitar	15 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 orang	100.000.000
		jumlah fasilitasi program adopsi anak	Kab. Blitar	5 anak				5 anak	
		jumlah fasilitasi program tetirah	Kab. Blitar	20 anak				20 anak	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kab. Blitar	2 kerjasama	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kerjasama	150.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase update data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Blitar	100 %	1.550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	1.550.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Blitar	100 %	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		100 %	750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Umum			
		jumlah penerima BPNT yang difasilitasi	Kab. Blitar	98.000 KPM				98.000 KPM	
		jumlah penerima PBI-JK yang difasilitasi	Kab. Blitar	402.000 KPM				402.000 KPM	
		jumlah penerima PKH yang difasilitasi	Kab. Blitar	51.000 KPM				51.000 KPM	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Blitar	1000 paket	10.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 paket	10.500.000.000
		Jumlah korban bencana yang diberi pendampingan psikososial	Kab. Blitar	20 orang				20 orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana	Kab. Blitar	1 kampung	846.024.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kampung	846.024.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah Taruna Siaga Bencana	Kab. Blitar	40 orang	544.134.000	Dana Transfer		40 orang	544.134.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bencana					Umum-Dana Alokasi Umum			
TOTAL					22.709.665.306				22.709.665.306

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Sosial, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2022 diharapkan dapat dilaksanakan dengan paradigma baru. Dimana selama ini masih menggunakan paradigma lama yaitu dengan pendekatan kelayakan sebagai penyandang masalah, sehingga orientasinya pada pemecahan masalah (*problem solving*). Sebagai konsekuensinya peran pemerintah lebih dominan melalui langkah rehabilitative, penyantunan, pemberian bantuan dan lain-lain. Dalam jangka panjang ternyata paradigma ini menciptakan sikap malas dan ketergantungan yang tinggi.

Sementara itu paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah *Employment Community For Development*, artinya memandang Penyandang Masalah Sosial dari segi potensi dan kemampuan internalnya. Dimana paradigma ini tidak memandang tidak melihat kelayakan sebagai orang bermasalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan potensi melalui kegiatan pemberdayaan. Dengan paradigma ini diharapkan tumbuh sikap dan perilaku kemandirian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial kedepan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Komitmen yang tinggi atas dasar keterpanggilan dan rasa kesetiakawanan sosial perlu tetap ditumbuhkan di kalangan para pelaku usaha kesejahteraan sosial baik dari birokrat maupun masyarakat.
2. Prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan atau memanusiakan manusia harus tetap terjaga dan terpelihara dalam rangka pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Ketepatan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
5. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
6. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja tahun 2022 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan strategi meningkatkan pembangunan bagi PMKS.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2022 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Blitar

ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620101 198803 1 028

